



Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Karina Gama Soleha¹ dan Ayief Fathurrahman¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email korespondensi: karinagamasoleha@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, PMA dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia tahun 1985 hingga 2014. Alat analisis yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, PMA pun berpengaruh signifikan dan negatif dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan IPM.

Kata kunci: Pertumbuhan IPM, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, PMA-Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN), VECM.

Pendahuluan

Salah satu tujuan didirikannya suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dengan kata lain melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan manusia, hal ini dicerminkan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia dan juga dapat menentukan peringkat pembangunan suatu negara yang di dalamnya terdapat tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Pembangunan adalah syarat terpenting bagi kehidupan suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkelanjutan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Pembangunan manusia merupakan tujuan sentral dari pembangunan ekonomi di suatu negara. Pembangunan sumber daya manusia mencakup peningkatan kapasitas dasar dalam proses pembangunan. Kapasitas dasar menurut Todaro (2003) yakni tiga nilai pokok keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kecukupan (sustenance), jati diri (selfsteem), dan kebebasan (freedom). Kecukupan dalam hal ini merupakan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. Fungsi dasar dari kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar masyarakat, atas dasar itulah syarat penentu keberhasilan ekonomi adalah membaiknya kualitas kehidupan seluruh lapisan masyarakat (Ginting, 2008).

Pembangunan manusia dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). UNDP menerbitkan laporan tahunan mengenai kerja kinerja IPM pada Negara-negara di dunia.

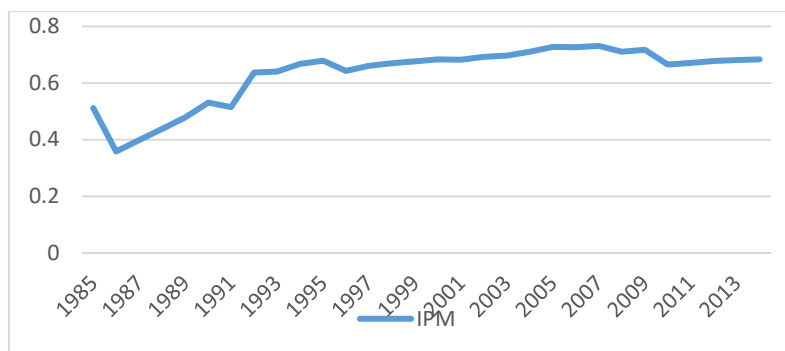
Tabel 1 Peringkat IPM Negara-Negara Asia Tahun 2012-2014

No	Negara	IPM Negara di Asia Tenggara dari 188 Negara		
		2012	2013	2014
1	Singapura	11	9	11
2	Brunai Darussalam	30	30	32
3	Malaysia	62	62	62
4	Thailand	89	89	93
5	Indonesia	109	108	110
6	Filipina	118	117	115
7	Vietnam	121	121	141
8	Laos	139	139	116
9	Myanmar	150	150	148
10	Kamboja	137	137	143

Sumber: BPS DIY, (2016)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2014 posisi IPM Indonesia di dunia menurun dari 108 ditahun 2013 menjadi urutan ke-110 dari 187 negara, dengan IPM sebesar 0.684 dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan IPM Indonesia termasuk rendah dibandingkan dengan Negara-negara lainnya. Indonesia berada pada peringkat kelima di antara negara-negara Asia Tenggara, yakni dibawah Singapura, Brunai Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Meskipun di Indonesia mengalami tren positif pada IPM, akan tetapi jika dibandingkan dengan negara terdekat, kedudukan Indonesia masih tertinggal sangat jauh. Dalam hal ini banyak faktor yang mempengaruhi, di antaranya tingginya jumlah penduduk dan faktor luas wilayah (Athar, 2016).

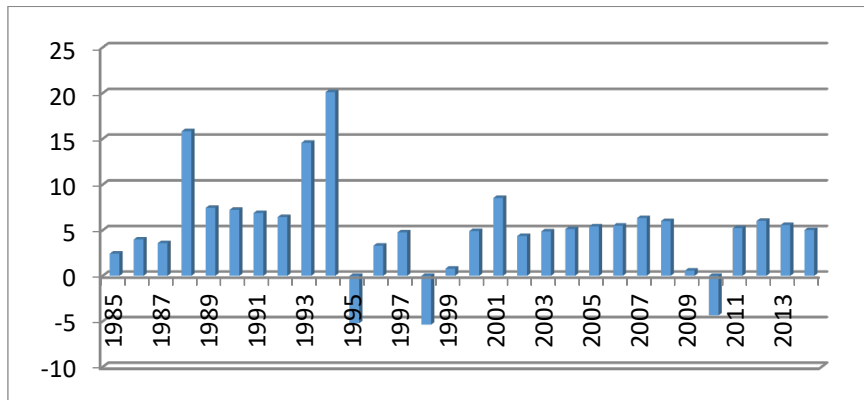
Pada saat ini Indonesia menghadapi masalah dalam pembangunan yaitu rendahnya tingkat pembangunan manusia, dalam hal ini dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti dalam bidang educational achievement yakni kurangnya tingkat pendidikan pada masyarakat, dalam bidang kesehatan yakni angka harapan hidup yang rendah dan dalam access to resource yakni PDB riil per kapita serta tingkat angkatan kerja yang cukup rendah. Hal ini merupakan masalah yang sangat penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:



Gambar 1 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 1984-2014

Sumber: UNDP (2015)

Dari tabel diatas terlihat bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia secara keseluruhan terjadi beberapa kali penurunan, tetapi penurunan yang paling besar yakni terjadi tahun pada tahun 1985 IPM 0.512 menuju ke tahun 1986 dengan IPM 0.358. Pencapaian Indonesia dalam IPM tersebut sangat rendah berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun. Produk Domestik Bruto dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 2 Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1985-2014

Gambar 1.2 menunjukkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi. Hal ini berarti bahwa aktifitas perekonomian di Indonesia tumbuh namun tidak sejalan dengan IPM Indonesia yang masih tertinggal di bawah pencapaian IPM nasional.

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dikategorikan menjadi kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah atas ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$), dan kategori rendah ($IPM < 50$). Peringkat tersebut menempatkan Indonesia pada posisi menengah keatas, akan tetapi relatif jauh untuk dapat mencapai tingkat pembangunan manusia pada level tinggi.

Disisi lain Presiden Joko Widodo mengarahkan paket kebijakan ekonomi tahap II nya untuk fokus kepada upaya meningkatkan investasi, berupa deregulasi dan debirokratisasi peraturan untuk mempermudah investasi, seperti kemudahan layanan investasi 3 jam, pengurusan tax allowance dan tax holiday lebih cepat, PPN transportasi ditiadakan, pengurangan pajak bunga deposito, serta perampangan izin sektor kehutanan baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing bukan saja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia melainkan juga pembangunan manusianya.

Metode Penelitian

Obyek penelitian ini adalah pertumbuhan indeks pembangunan manusia Indonesia dan metode penelitiannya adalah analisis kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan pendidikan, PMDN serta PMA terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 1985 sampai 2014. Pada penelitian ini menggunakan variabel dependen pertumbuhan indeks pembangunan manusia Indonesia dan variabel independennya adalah pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan pendidikan, PMDN dan PMA.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa time series dalam bentuk tahunan selama periode tahun 1985 sampai dengan 2014. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nations Development Programme (UNDP). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Vector Error Corection Model (VECM) dengan bentuk data time series.

Hasil dan Pembahasan

Uji Akar Unit (Unit Root Test)

Uji akar unit atau disebut juga dengan uji stasioner yang digunakan untuk menguji data yang bersifat time

series agar terhindar dari spurious regression. Hasil uji akar unit sebagai berikut.

Table 2 Unit Root Test – Augmented Dickey Fuller (ADF-test)

Test Variable	ADF					
	Level	Prob	Note	First Difference	Prob	Note
	<i>t-statistic</i>			<i>t-statistic</i>		
IPM	-1.368691	0.5835	Tidak Stasioner	-8.222278	0.0000	Stasioner
PPBK	-4.541918	0.0012	Stasioner	-6.043751	0.0000	Stasioner
PPBP	-5.209408	0.0002	Stasioner	-5.714227	0.0001	Stasioner
PMDN	-6.466452	0.0000	Stasioner	-5.576984	0.0001	Stasioner
PMA	-5.937230	0.0000	Stasioner	-4.998686	0.0005	Stasioner

Sumber: Hasil olahan Eviws 9

Dari tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa data pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK), Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Penanaman Modal Asing (PMA) telah stasioner pada first difference. Data dapat dikatakan stasioner ketika ADF t-statistik >Critical Value 5%. Karena kelima variabel tersebut stasioner pada first difference maka nilai didefinisikan dalam persamaan berikut ini:

$$DIPM_1 = A_0 + A_1DPPBK_{t-2} + A_2DPPBP_{t-2} + A_3DPMA_{t-2} + A_4DPMDN_{t-2} + \varepsilon_t$$

Karena D merupakan first difference, itu artinya bahwa DIPM merupakan first difference dari IPM, DPPBK merupakan first difference dari pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, DPPBP merupakan first difference dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, DPMDN merupakan bentuk first difference dari penanaman modal dalam negeri dan DPMA merupakan bentuk first difference dari penanaman modal asing.

Uji Panjang lag

Langkah kedua dalam proses ini adalah menentukan panjang lag optimal untuk sistem VAR guna melihat hubungan jangka panjang antar variabel. Penentuan lag pada model VAR sesuai dengan criteria informasi yang direkomendasikan oleh Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SIC), Hannan-Quinn (HQ) dan Final Prediction Error (FPE). Kriteria yang memiliki AIC, SIC, HQ atau FPE paling kecil adalah lag yang akan digunakan. Pengujian lag ini digunakan agar tidak terdapat permasalahan autokorelasi dalam sistem (Basuki, 2015).

Tabel 3 Kriteria Panjang Lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-593.2768	NA	5.71e+11	41.26047	41.49621	41.33430
1	-543.5398	78.89309*	1.07e+11*	39.55447*	40.96892*	39.99746*

* indicates lag order selected by the criterion

LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

FPE: Final prediction error

AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion

HQ: Hannan-Quinn information criterion

Sumber: Hasil olahan Eviws 9

Tabel 3 memperlihatkan hasil otomatis panjang lag dengan menggunakan Eviws 9. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai dari LR statistic, Final Prediction Error (FPE), Akaike information criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC), dan Hannan-Quinn Information (HQ) berada pada lag 1 masing-masing dengan nilai sebesar 78.89309, 1.07e+11, 39.55447, 40.96892 dan 39.99746. Berdasarkan

hasil pengolahan data di atas maka, lag 1 merupakan lag yang tepat digunakan untuk VECM.

Pengujian Stabilitas VAR

Setelah menentukan kriteria panjang lag untuk estimasi VAR, langkah selanjutnya adalah pengujian stabilitas VAR menggunakan Root of Characteristic Polynomial. Ketika nilai dari Roots dan Modulus polynomial kurang dari 1 (<1) berarti bahwa variabel tersebut stabil.

Tabel 4 Root of Characteristic Polynomial

Root	Modulus
0.766152	0.766152
-0.289668 - 0.594837i	0.661618
-0.289668 + 0.594837i	0.661618
0.175390 - 0.604367i	0.629302
0.175390 + 0.604367i	0.629302
-0.475739 - 0.239542i	0.532642
-0.475739 + 0.239542i	0.532642
0.140211 - 0.342295i	0.369899
0.140211 + 0.342295i	0.369899
0.228513	0.228513

No root lies outside the unit circle.

Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Berdasarkan tabel 4 di atas semua nilai dari Roots dan Modulus kurang dari 1 (<1), dan berdasarkan VAR telah memenuhi stabilitas kontrol, yang menyebutkan bahwa “No root lies outside the unit circle ” ini berarti bahwa variabel dapat digunakan pada model VAR.

Uji Kointegrasi Johansen

Uji kointegrasi bertujuan untuk mengetahui keberadaan hubungan antar variabel, khususnya dalam jangka panjang. Apabila ditemukan kointegrasi pada variabel-variabel dalam model, maka sudah pasti terdapat hubungan jangka panjang antar variabel dan dapat dilanjutkan dengan menggunakan VECM. Namun, apabila tidak terkointegrasi maka dapat menggunakan model VAR first Difference (FDVAR). Guna melihat angka integrasinya dengan melihat Trace Statistic dan Maximal Eigen statistic dan berdasarkan probabilitasnya. Apabila probabilitasnya $\alpha > 0.05$, maka tidak terdapat kointegrasi pada variabel. Hasil dari uji kointegrasi johansen diperlihatkan pada table 4.5 dibawah ini.

Tabel 5 Uji Kointegrasi Johansen

Model	Hypothesized	Trace Statistic	Prob.	Max-Eigen statistic	Prob.	Variabel
Panjang Lag = 1	None *	138.7576	0.0000	49.48723	0.0003	IPM
	At most 1 *	89.27037	0.0000	38.59991	0.0013	PPBK
	At most 2 *	50.67045	0.0001	21.47615	0.0447	PPBP
	At most 3 *	29.19431	0.0003	16.67264	0.0204	PMA
	At most 4 *	12.52167	0.0004	12.52167	0.0004	PMDN

Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Tabel 5 diatas menunjukkan hasil dari Johansen Juselius Co-integration test. P-value dari MacKinnon-Haug-Mihelis adalah $0.000 < \alpha = 0.05$, hal ini berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain model signifikan. Pada Trace statistic dapat dilihat bahwa lima variabel terkointegrasi dan pada Max-Eigen statistic terdapat lima variabel yang terkointegrasi. Dengan kata lain terdapat kointegrasi antara IPM, PPBK, PPBP, PMA, PMDN pada tahun 1985-2014. Berdasarkan pada tes ini terdapat indikasi bahwasanya kelima variabel memiliki kointegrasi jangka panjang.

Model VECM

Hasil dari pengolahan data pada VECM maka akan didapatkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dependen (DIPM) dan variabel independen (DPPBK, DPPBP, DPMA dan DPMDN). Pada penelitian ini menggunakan lag 1 berdasarkan pada lag length criteria. Tabel 6 memperlihatkan hubungan jangka panjang antara Indeks Pembangunan Manusia (DIPM) sebagai variabel dependen dan variabel lainnya sebagai variabel independen, hasilnya sebagai berikut:

Tabel 6 Model VECM Jangka Panjang

Variabel	Jangka Panjang	
	Koefisien	T- Statistik
PPBK (-1)	0.001444	2.13158
PPBP(-1)	-0.001660	-4.88154
PMA (-1)	-0.000676	-2.91624
PMDN (-1)	0.002500	5.58659

Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Tabel 6 di atas merupakan ringkasan dari analisis VECM guna melihat pengaruh variabel yang signifikan dalam hubungan jangka panjang. Hasilnya adalah seluruh variabel independen yang mempengaruhi IPM memiliki nilai yang signifikan yaitu $\alpha > 5$ persen, dengan rincian pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) 2.13158, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) -4.88154, Penanaman Modal Asing (PMA) -2.9162, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 5.58659.

The First normalized equation in Long-Run Estimate:

$$IPM = 0.001444 \text{ PPBK} (-1) - 0.001660 \text{ PPBP} (-1) - 0.000676 \text{ PMA} (-1) + 0.002500 \text{ PMDN} (-1)$$

Berdasarkan persamaan perkiraan VECM jangka panjang di atas, maka hubungan jangka panjang antara pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai positif signifikan terhadap PPBK dan PMDN. Sedangkan pertumbuhan IPM memiliki nilai negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan PPBP, PMA.

Tabel 7 Model VECM Jangka Pendek.

Variabel	Jangka Pendek	
	Koefisien	T- Statistik
CoIntEq1	-0.129173	-3.57793***
D(IPM(-1))	0.011128	0,10040
D(PPBK(-1))	0,000140	1.00561
D(PPBP(-1))	0,000234	-3.36152***
D(PMA(-1))	-6.96E-05	1.87369
D(PMDN(-1))	6.18E-05	0.82468
C	0.011929	2.99108***
R-squared	0.645659	
Adj. R-squared	0.544419	

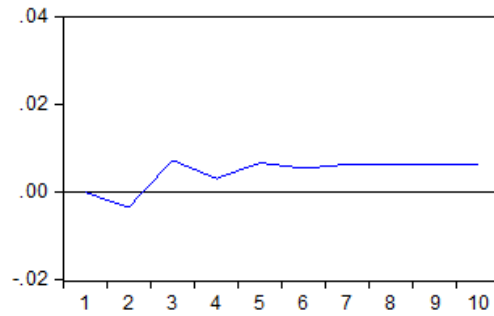
***, **, *, 1%, 5%, 10%

Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Tabel 7 di atas merupakan ringkasan dari analisis VECM guna melihat pengaruh variabel yang signifikan dalam hubungan jangka pendek. Dalam jangka pendek pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPDP) negatif dan signifikan, sedangkan PPBK, PMA dan PMDN tidak signifikan, hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan jangka panjang beberapa variabel memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan IPM. Persamaan dari model VECM sebagai berikut:

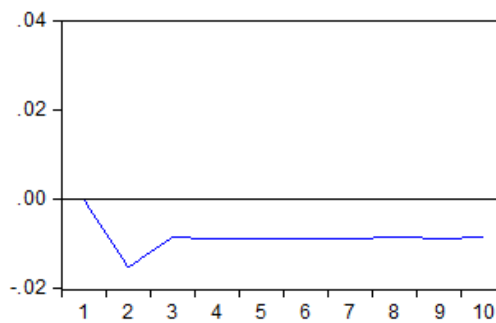
$DIPM = -0.129173 + 0.011128D(IPM(-1)) + 0,000140D(PPBK(-1)) - 0,000234D(PPBP(-1)) - 6.9E-05D(PMA(-1)) + 6.18E-05D(PMDN(-1)) + 0.011929CointEq1$
Analisis Impulse Response Function (IRF)

Fungsi dari Impulse Response adalah untuk melihat respons variabel endogen dari waktu ke waktu terhadap guncangan (shock) variabel tertentu dan berapa lama guncangan tersebut terjadi (Basuki, 2015).



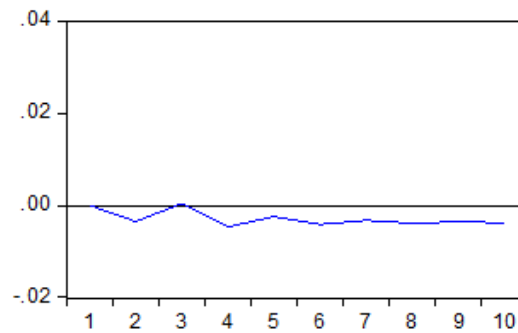
Gambar 3 Response of IPM to PPBK
Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Dari grafik di atas kita dapat melihat respons pertumbuhan indeks pembangunan manusia terhadap pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan. Pada periode pertama dan kedua IPM merespons negatif serta mengalami penurunan, memasuki periode ketiga IPM mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun pada periode keempat hingga periode kesepuluh respons IPM mengalami penurunan tetapi masih positif. Hal ini berarti bahwa perubahan pada pertumbuhan PPBK adakan berdampak positif pada pertumbuhan IPM, oleh karena itu pemerintah harus terus mempertimbangkan dan menjaga PPBK agar alokasi dananya digunakan secara tepat dan dapat terlihat dan dirasakan oleh masyarakat, yang bisa dilihat melalui IPM.



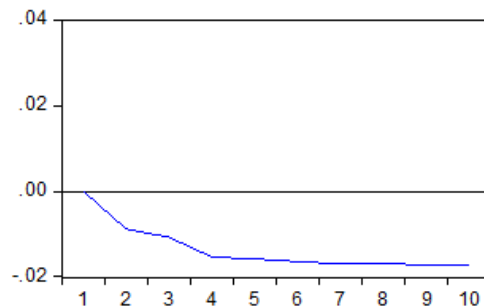
Gambar 4 Response of IPM to PPBP
Sumber: Hasil olahan Eviews 9

Grafik di atas menunjukkan respons IPM terhadap pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP). Pada periode pertama hingga ketiga memberikan respons negatif yang berfluktuatif, dan pada periode ketiga hingga akhir respons IPM terhadap PPBP konstan. Hal ini disebabkan karena data pada PPBP berfluktuatif, jadi pada kenyataannya ketika pertumbuhan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan turun tajam, pertumbuhan IPM tetap naik meskipun tidak drastis.



Gambar 5 Response of IPM to PMA
Sumber: Hasil olahan Eviws 9

Dari grafik di atas kita dapat melihat respons IPM terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA). Periode pertama hingga periode keempat terjadi respons negatif yang fluktuatif dari IPM, dan konstan pada periode kelima hingga kesepuluh. Hal ini berarti bahwa perubahan pada pertumbuhan PMA akan menyebabkan penurunan pada pertumbuhan IPM, hal ini bisa disebabkan oleh dampak negatif dari PMA lebih besar dari pada dampak positifnya seperti kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat, ataupun disebabkan terbengkalainya sektor pertanian dikarenakan PMA banyak dilakukan pada sektor industri sehingga banyak tenaga kerja yang terserap disektor industri. Oleh karena itu pemerintah harus lebih selektif dalam mempertimbangkan perizinan dan pengoperasian PMA di Indonesia.



Gambar 6 Response of IPM to PMDN
Sumber: Hasil olahan Eviws 9

Grafik di atas menggambarkan respons pertumbuhan IPM terhadap pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada periode pertama tidak ada perubahan pada IPM ketika PMDN berubah, tetapi pada periode pertama menuju kedua hingga periode keempat IPM mengalami penurunan yang signifikan, selanjutnya pada periode kelima hingga kesepuluh juga mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Hal ini serupa dengan PMA, kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat, ataupun disebabkan terbengkalainya sektor pertanian dikarenakan PMDN banyak dilakukan pada sektor industri sehingga banyak tenaga kerja yang terserap disektor industri.

Analisis Variance Decomposition (VD)

Analisis ini bertujuan untuk mengukur komposisi atau kontribusi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya.

Tabel 8 Hasil Variance Decomposition

Periode	S.E	DIPM	DBBPK	DPPBP	DPMA	DPMDN
1	0.020731	100.0000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	0.038968	77.00467	0.915658	14.75756	1.468920	5.853194
3	0.052913	79.06236	1.725184	10.21805	0.905078	8.089328
4	0.066822	78.29109	1.137352	8.259551	1.545881	10.76612
5	0.079063	78.29047	1.179147	7.177694	1.422028	11.93066
6	0.089886	78.08033	1.071644	6.495821	1.576377	12.77582
7	0.099944	77.95746	1.056971	6.057290	1.563651	13.36462
8	0.109004	77.86364	1.033962	5.725494	1.616903	13.76000
9	0.117531	77.77835	1.019609	5.498911	1.624866	14.07827
10	0.125417	77.72345	1.012136	5.312521	1.647352	14.30454

Sumber: Hasil olahan Eviws 9

Tabel 8 merupakan hasil dari variance decomposition dari DIPM. Pada periode pertama DIPM dipengaruhi oleh variabel itu sendiri sebesar 100 persen, dan selanjutnya pada periode ke sepuluh pengaruh dari DIPM itu sendiri berkurang menjadi 77 %. Pada tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada periode pertama variabel DIPM dipengaruhi oleh DPPBK sebesar 0%, akan tetapi pada akhir periode DPPBK mempengaruhi DIPM sebesar 1.0%. Untuk variabel DPPBP berpengaruh 0% terhadap DIPM di periode pertama dan meningkat menjadi 5.3% pada akhir periode. Untuk DPMA berpengaruh 0% pada awal periode dan meningkat menjadi 1.64% pada akhir periode. Selanjutnya variabel DPMDN mempengaruhi DIPM sebesar 0% pada periode pertama dan pada akhir periode mengalami kenaikan sebesar 14.3%.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa variabel pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) memiliki hubungan signifikan positif terhadap IPM, dengan nilai koefisien sebesar 0.001444. Ini berarti apabila terjadi kenaikan 1% pada PPBK akan meningkatkan pertumbuhan IPM sebesar 0.0014%. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan adanya pengaruh positif pertumbuhan PPBK terhadap pertumbuhan indeks pembangunan manusia, yang didukung dengan teori temuan penelitian terdahulu dari Athar (2016) kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi manusia, tanpa kesehatan penduduk/masyarakat tidak akan menghasilkan suatu produktivitas bagi negaranya, dan apabila ada jaminan kesehatan bagi masyarakatnya maka kegiatan ekonomi akan berjalan. Hal ini didukung pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti Patta, dengan adanya pembangunan sarana publik serta peningkatan kualitas bidang kesehatan merupakan penunjang berjalannya kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya semakin tinggi Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan akan meningkatkan IPM di Indonesia (Patta, 2012).

Sementara variabel pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) memiliki hubungan signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan IPM. Pada hasil penelitian ini ditemukan nilai koefisien PPBP -0.001660, berarti ketika terjadi peningkatan PPBP 1% akan menurunkan pertumbuhan IPM sebesar -0.0016%. Penemuan ini sejalan dengan laporan “Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review)”, yang dirilis oleh Bank Dunia tahun 2013 menyatakan bahwa anggaran fungsi pendidikan di Indonesia yaitu 20% dari APBN ternyata belum efektif dalam meningkatkan dunia pendidikan. Alokasi anggaran yang cukup besar digunakan untuk membayar gaji guru dan program sertifikasi guru yang dari tahun ke tahun meningkat tajam seiring dengan peningkatan jumlah guru secara keseluruhan (Kemdikbud, 2016).

Menurut standar internasional, alokasi anggaran pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia masih tergolong rendah oleh karena itu pola pembiayaan dalam Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) tidak berdampak pada perbaikan kualitas pendidikan yang akhirnya berdampak signifikan negatif terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan laporan pemantauan lapangan dana pendidikan yang dilakukan Tim Pencegahan KPK pada tahun 2014, terdapat empat permasalahan mendasar dalam pengelolaan anggaran pendidikan yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sistem administrasi (data yang kurang memadai), kekosongan pengawasan dan lemahnya kontrol publik maupun sosial. Salah satu contohnya adalah banyak sekali Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disalah gunakan. BOS merupakan dana pendidikan yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar dan menengah. Sementara itu, tujuan khusus BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri SMP/SMPLB/SMP/SATAP/SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apa pun, baik di sekolah negeri maupun swasta, meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta; mengurangi angka putus sekolah (SMA/SMK); meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) siswa SMA/SMK. Potensi kebocoran dana BOS meliputi:

- a) Manipulasi jumlah siswa penerima BOS yang bertujuan untuk mendapatkan dana BOS yang lebih besar dari jumlah siswa, dengan demikian dana tersebut tidak ada realisasinya dan diambil oleh oknum sekolah tersebut untuk pribadi (Kemdikbud, 2016).
- b) Adanya penyimpanan anggaran dana BOS di Kas Umum Daerah (KUD) dan ketika melakukan transfer dari KUD ke rekening sekolah dimungkinkan adanya kuasa dinas guna meminta bagian (kisaran variatif) 10%-50% dari total BOS dengan modus meminta bayaran administrasi (Kemdikbud, 2016).
- c) Laporan tahunan yang sering terlambat dan bahkan terjadi manipulasi laporan (Kemdikbud, 2016)

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan negatif, dengan nilai koefisien sebesar -0.000676, artinya bila PMA mengalami kenaikan 1% akan diikuti dengan penurunan pertumbuhan IPM sebesar -0.00067%. temuan ini sesuai dengan penelitian Ana (2015) yang menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini disebabkan karena kebutuhan tenaga kerja oleh investasi asing (PMA) adalah berasal dari negara mereka sendiri yang di bawa ke Indonesia yang akhirnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia sangat minim, sehingga pendapatan di Indonesia berkurang dan menyebabkan IPM menurun (Ana, 2015).

Dalam bukunya "Agenda Mendesak Bangsa- Selamatkan Indonesia!" Amin Rais menjelaskan bahwa globalisasi merupakan alasan utama yang menyebabkan permasalahan negara dalam hal pembangunan manusia. Globalisasi merupakan neokolonialisme dimasa sekarang, salah satu bentuknya adalah Penanaman Modal Asing (PMA). Dahulu Indonesia merupakan Negara yang dijajah, hingga saat ini pun negara Indonesia masih terjajah pola pikirnya terutama para pemimpin. Dalam hal PMA ini Indonesia merupakan negara yang tidak berani mengambil keputusan (Rais, 2008).

Bila ditelaah, Indonesia telah terperangkap cukup dalam, dalam perangkap neokolonialisme yang berwajah globalisasi. Dengan adanya PMA di Indonesia akan menyebabkan berkurangnya lahan produktif termasuk lahan-lahan pertanian yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan bahan pangan, alhasil dapat terjadi import bahan pangan besar-besaran. Disisi lain Amerika yang merupakan Negara adidaya yang melatar belakangi adanya globalisasi ini justru melindungi para petaninya dari kompetisi petani luar dengan cara memberikan subsidi milyaran dollar kepada petaninya sehingga pasar pertanian mereka tidak dapat ditembus oleh produk pertanian negara-negara berkembang (Rais, 2008).

Makin banyak tenaga kerja yang tersedot di sektor industri, menyebabkan berkurangnya tenaga kerja pertanian. Pada saat tidak ada lagi tenaga kerja di bidang pertanian, maka pemilik lahan lebih memilih mengalokasikan lahan untuk kepentingan industri, yang akhirnya akan terjadi eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan yang akan merusak alam di Indonesia yang berujung pada pencemaran lingkungan yang berdampak bagi kesehatan masyarakat yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap komponen dalam IPM dan akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dalam beberapa penanaman modal asing memberikan keuntungan yang lebih besar kepada penanam modal. Hasil usaha penanaman modal asing banyak yang dibawa ke negara investor, untuk itulah pemerintah perlu mempertimbangkan faktor keuntungan dan

kerugian secara cermat. Salah satu kasusnya adalah Freeport, menunjukkan kerugian atas kehilangan sumber daya alam yang begitu berharga, pembunuhan lingkungan secara sistematis, sengaja dan terus menerus, contohnya limbah Freeport yang mampu menutupi kota Bekasi, Depok serta Jakarta. Pelanggaran pembayaran pajak serta pelenyapan hak hidup, sosial, hak ekonomi serta budaya. Sementara utang negara terus membengkak (Fitri, 2013).

Variabel pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien sebesar 0.002500, artinya bila PMDN naik 1% akan meningkatkan pertumbuhan IPM sebesar 0.0025%. Hal ini sejalan dengan temuan Ningrum (2015) yang mengatakan bahwa dengan meningkatnya PMDN maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini dapat disebabkan modal dan keuntungan yang diterima berputar di dalam negeri, berbeda dengan PMA yang berpengaruh negatif signifikan pada IPM yang modal serta keuntungannya dibawa keluar atau negara asalnya sehingga menyebabkan perekonomian lesu. PMDN yang dapat dilaksanakan bagi swasta nasional adalah perikanan, perkebunan, perdagangan, jasa umum dan lain-lain. Sedangkan PMDN yang terdiri dari kerja sama modal Negara dan modal swasta nasional adalah telekomunikasi, perkebunan dan sebagainya. Salah satu contohnya adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berdiri sejak 1951 dari sisi lingkungan dan kesehatan dapat dikatakan wujud PMDN yang berhasil, karena berhasil mendapat reputasi industri jamu bertaraf modern terbesar Indonesia, bahan baku yang digunakan pun obat herbal dari alam dengan kata lain PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk ini bergantung pada alam sehingga industri ini perlu merawat dan menjaga eksistensi dari tanaman-tanaman obat yang digunakan, dan hebatnya lagi limbah cair dari industri tersebut diolah menjadi air bersih untuk menyiram tanaman obatnya, dan limbah padatnya diolah menjadi pupuk organik (Muncul, 2013).

Dari sisi ekonomi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk merupakan penyumbang pajak terbesar di Jawa Tengah, pada tahun 2013 jumlah pajak yang dibayarkan mencapai Rp 600.000.000.000,- serta mendapat penghargaan dari direktorat Jendral Pajak karena keaktifan dalam membayar pajak, dengan keaktifan membayar pajak oleh PMDN maka akan meningkatkan APBN sehingga pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan lancar. Pembangunan yang lancar, maka pendidikan serta kesehatan pun akan semakin baik, dan pertumbuhan ekonomi meningkat yang akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Sismanto, 2014).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Pada penelitian ini pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (PPBK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, dengan nilai koefisien sebesar $0.0014 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis terbukti benar. (2) Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP) berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar $-0.001660 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya optimalisasi dalam penggunaan anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (PPBP), dengan demikian hipotesis tidak terbukti. (3) Variabel pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM, dengan nilai koefisien sebesar $-0.000676 < 0.05$, dengan demikian hipotesis tidak terbukti. Variabel pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien sebesar 0.002500, dengan meningkatnya PMDN maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dengan demikian hipotesis terbukti benar.

Daftar Pustaka

Adhisasmita, H. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Ana, S. N. (2015). Pengaruh Penanaman Modal Terhadap Penyerapan tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat Di Kotagresik Periode 2008-2012. *Skripsi Ekonomi Pembangunan*.
- Athar, M. (2016). Pengaruh Belanja Pemerintah di Sektor Pendidikan, Sektor Kesehatan dan PDRB Terhadap Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota Sulawesi Barat Tahun 2006-2013. *Program Studi Magister Ekonomi Universitas Gajah Mada*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Retrieved November 27, 2016, from www.bps.go.id
- Basuki, T. A. (2015). *Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Danisa Media.
- BPS. (2013). Retrieved November 15, 2016, from Badan Pusat Statistik : www.bps.go.id
- BPS. (2009). *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia*. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik.
- Dunia, B. (2013). *Tinjauan Belanja Publik di Sektor Pendidikan (Education Public Expenditure Review)*. Jakarta: Inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Eiteman, David, K., Arthur, Stonehill, & Michael. (1989). *Multinational Business Finance*. America: Inc. United State of America.
- Fitri. (2013). Kontrak-Kontrak Asing yang Merugikan Bangsa Indonesia.
- Ginting, C. K. (2008). *Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia*. Medan: Tesis Master Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Gujarati. (2003). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Kemdikbud, I. (2016, Maret 25). *Inspektorat Jendral Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan*. Retrieved November 23, 2016, from Potensi Korupsi Dunia Pendidikan: <http://itjen.kemdikbud.go.id>
- Mangkoesubroto, G. (2000). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Maryani. (2010). *Epidemiologi Kesehatan*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Muncul, S. (2013). *Sido Go Green*. Semarang: PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk .
- Patta, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. *Skripsi Ilmu Ekonomi*, UniVersitas Hasanuddin Makasar.
- Prasetya, F. (2012). *Teori Pengeluaran Pemerintah*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Primananda, P. (2015). Kinerja Perekonomian, Desentralisasi Fiskal dan Hubungannya dengan Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada*.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda Mendesak Bangsa - Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press.
- Royan, M. M. (2015). Pengaruh Investasi Publik dan Swasta Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books.
- Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Sismanto, A. (2014, 1 23). *Pajak Sido Muncul Capai Rp 600 M*. Retrieved Desember 2, 2016, from [Sindonews.com: http://ekbis.sindonews.com](http://ekbis.sindonews.com)
- Sukirno, S. (1985). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: FE UI.
- Sumanto, T. (2012). *Hubungan Kecerdasan Emosional dan Kemandirian Belajar Jurusan Otomotif SMK Muhammadiyah I Sleman*. Yogyakarta: UNY.
- Sumas, S. (2012). Dampak Kebijakan Fiskal Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.
- Suparmoko. (1994). *Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Tirtahardja, U., & Sula, L. (1998). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara RI Tahun 2007.Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1976. *Undang-Undang No.1 Tahun 1976 tentang Penanaman Modal Asing*. Lembaran Negara RI Tahun 1976.Sekretariat Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1968. *Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*. Lembaran Negara RI Tahun 1968.Sekretariat Negara. Jakarta.
- UNDP. (2014). Retrieved November 28, 2016, from www.id.undp.org
- UNDP. (1990). *Human Development Report*. Indonesia: United Nations Development Program.

UNDP. (1995). *Human Development Report*. New York: United Nations Development Programme.

Yuliati, A. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Wilayah Perbatasan Darat Indonesia. *Jurnal Ekonomi*.